

KONSERVASI DAN PENGELOLAAN PENYU: PERAN SWASTA DALAM PERLINDUNGAN SATWA LANGKA

Ratu Chika Fathiatul Jannah¹, Yusmardono², Fajar Sidiq Fathoni³

¹Community Development Officer CSR PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate

²Supervisor Receiving, Storage & Distribution PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate

³Jr. Ast I CSR & SMEPP PT Pertamina Patra Niaga SH C&T Region Papua Maluku

Corresponding Email: ratuchika00@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

CSR policies and programs are beginning to gear toward biodiversity—variability among living organisms on the planet such as species, ecosystems, and genetic diversity—and conservation management. While there is an increasing trend towards conserving biodiversity, biodiversity and conservation management are still a small discussion in CSR and business language. Fortunately, at the global level some business groups are aware that biodiversity and development are inextricably linked, and the pressure of development activities on biodiversity is not always positive. There are some best practices that can serve as valuable lessons for other businesses. For example, in India, along with the coastal village of Maharashtra, Tata Consultancy Services, a subsidiary of Tata Group, initiated the 'Sea Turtle Conservation Programme' from 2011 to 2014. However, in the case of Indonesia, the literature on CSR and turtle conservation is relatively underdeveloped. In this regard, this study examines how the private sector in Indonesia has implemented a turtle conservation project on Tobololo Beach, Ternate, North Maluku.

Keywords: CSR, biodiversity, endangered animal conservation, sea turtle conservation.

ABSTRAK

Kebijakan dan program CSR mulai diarahkan pada keanekaragaman hayati—variabilitas di antara organisme hidup di planet ini seperti spesies, ekosistem, dan keragaman genetik—dan pengelolaan konservasi. Meskipun ada kecenderungan peningkatan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati dan pengelolaan konservasi masih menjadi diskusi kecil dalam CSR dan bahasa bisnis. Untungnya, di tingkat global beberapa kelompok bisnis menyadari bahwa keanekaragaman hayati dan pembangunan terkait erat, dan tekanan kegiatan pembangunan terhadap keanekaragaman hayati tidak selalu positif. Ada beberapa praktik terbaik yang bisa dijadikan pelajaran berharga bagi bisnis lain. Misalnya, di India, bersama dengan desa pesisir Maharashtra, Tata Consultancy Services, anak perusahaan Tata Group, memprakarsai 'Program Konservasi Penyu Laut' dari 2011 hingga 2014. Namun, dalam kasus Indonesia, literatur tentang CSR dan konservasi penyu relatif kurang berkembang. Berkaitan dengan hal tersebut, studi ini mengkaji bagaimana pihak swasta di Indonesia telah melaksanakan proyek konservasi penyu di Pantai Tobololo, Ternate, Maluku Utara.

Kata Kunci: CSR, keanekaragaman hayati, perlindungan hewan terancam punah, konservasi penyu.

PENDAHULUAN

Corporate social responsibility (CSR) telah menjadi kata kunci di dunia korporat. Di tingkat global, selama beberapa dekade terakhir, CSR telah dipraktikkan secara masif oleh sektor swasta. Cukup mudah untuk menemukan berbagai program CSR yang dijalankan oleh badan usaha. Di internet, misalnya, perusahaan selalu melaporkan kebijakan, program, dan kegiatan CSR mereka. Menariknya, dengan munculnya perlindungan lingkungan dan isu perubahan iklim, telah terjadi pergeseran dalam proyek CSR. Pada titik ini, kebijakan dan program

CSR mulai diarahkan pada keanekaragaman hayati—variabilitas di antara organisme hidup di planet ini seperti spesies, ekosistem, dan keragaman genetik—serta pengelolaan konservasi.

Meskipun ada kecenderungan peningkatan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati dan pengelolaan konservasi ternyata masih menjadi diskusi minor dalam CSR dan bahasa bisnis. Reade et al. (2014:55), misalnya, berpendapat bahwa entitas bisnis kerap mengabaikan urgensi keanekaragaman hayati dalam program CSR

mereka. Lebih buruk lagi, operasi bisnis mereka sering mencederai keanekaragaman hayati, dan terkadang mereka tidak memainkan peran penting dalam melindungi keanekaragaman hayati. Tanpa upaya yang signifikan dari entitas bisnis, hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengancam kesejahteraan manusia dan merugikan operasi bisnis jangka panjang seperti pekerja yang tidak sehat dan lainnya.

Untungnya, di tingkat global beberapa kelompok bisnis menyadari bahwa keanekaragaman hayati dan pembangunan terkait erat, dan tekanan kegiatan pembangunan terhadap keanekaragaman hayati tidak selalu positif. Hal itulah yang menjadi pendorong bagi kelompok usaha untuk turut serta melestarikan keanekaragaman hayati di bawah payung CSR. Apalagi, partisipasi badan usaha dalam melindungi keanekaragaman hayati dapat meningkatkan proyek konservasi dan membawa manfaat reputasi bagi perusahaan. Ada beberapa praktik terbaik yang bisa dijadikan pelajaran berharga bagi bisnis lain. Tata Chemicals melindungi hiu paus, yang terancam karena perburuan besar-besaran, di pantai Gujarat, India. Kampanye tersebut memunculkan perubahan positif di wilayah pesisir Saurashtra. Saat ini, jika hiu paus ditangkap oleh nelayan, mereka membebaskannya daripada menggunakannya untuk menghasilkan uang (Baroth dan Mathur, 2019:405-406).

Dalam nada yang sama, bersama dengan desa-desa pesisir Maharashtra, Tata Consultancy Services, anak perusahaan Tata Group, memprakarsai 'Program Konservasi Penyu Laut' dari 2011 hingga 2014. Proyek ini sangat mengesankan dalam melindungi 113 sarang dan penangkaran besar populasi penyu lekang (betina) yang terancam punah. Selain itu, inisiatif ini dapat merelokasi 12.119 telur ke penetasan, dan melepaskan 6.075 tukik ke laut (Baroth dan Mathur, 2019:407). Penjelasan tadi memunculkan pertanyaan: bagaimana proyek konservasi dan pengelolaan penyu diimplementasikan oleh sektor

privat di Indonesia? Ini adalah topik utama tulisan ini.

Walaupun pengelolaan keanekaragaman hayati dan konservasi telah memasuki bahasa korporasi, literatur bisnis yang berfokus pada topik ini jarang ditemukan. Hal ini dapat dikaitkan dengan kesenjangan antara ilmu alam seperti biologi atau ekologi dan studi bisnis (Winn dan Pogutz, 2013:204-205). Tidak mengherankan, sebagian besar kajian CSR jarang membahas keanekaragaman hayati dan pengelolaan konservasi, terutama proyek konservasi penyu.

Satu dari sekian publikasi ilmiah yang membahas tentang pengelolaan keanekaragaman hayati dan konservasi ditulis oleh Baroth dan Mathur (2019). Mereka memperlihatkan bagaimana perusahaan menginisiasi konservasi satwa liar, termasuk penyu, melalui proyek CSR di India. Menjadi catatan, fokus utama mereka bukanlah konservasi penyu. Lepas dari itu, mereka berpendapat bahwa kerangka peraturan di India memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan konservasi dan memenuhi tanggung jawab mereka di bidang lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, sekalipun program studi CSR semakin berkembang (CSR Netherlands, 2016), literatur tentang CSR ternyata masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju (Simatupang dan Swara, 2018:69). Tidaklah mengherankan, kajian tentang CSR dan keanekaragaman hayati, terlebih CSR dan konservasi penyu laut, sangat sulit ditemukan. Kenyataan tersebut sangatlah disayangkan. Sebab, walaupun dijuluki sebagai satu dari sekian "*mega-biodiversity countries*", negeri ini menghadapi persoalan keanekaragaman hayati akibat hilangnya hutan, tanaman, dan spesies hewan, dan eksploitasi berlebihan satwa liar (Persoon dan van Weerd, 2006). Bahkan, sebagian kelompok masyarakat mencari keuntungan ekonomi dari risiko aktivitas industri yang merusak kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan (Simatupang dan

Swara, 2019). Itulah sebabnya, kajian terkait intervensi bisnis pada isu keanekaragaman hayati, termasuk konservasi penyu laut, terasa sangat penting

Untungnya, selama beberapa tahun terakhir, beberapa penelitian yang mengulas CSR dan konservasi penyu telah muncul. Hidayati dan Wijayanto (2018), misalnya, menganalisis dampak program CSR konservasi penyu di Bali terhadap reputasi PT Coca Cola Amatil Indonesia Tbk. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, mereka mengungkapkan bahwa CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap citra merek PT Coca Cola Amatil Indonesia Tbk. Anggarsari (2016) juga melakukan penelitian dengan topik yang relatif sama. Ia menilai tingkat kepuasan penerima manfaat program CSR konservasi penyu yang dijalankan PT. Pertamina TBBM Tanjung Wangi di pantai Rejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat merasa puas dengan program CSR, sebab memungkinkan mereka untuk menangkap peluang dan mengatasi tantangan sosial dan lingkungan.

Di sisi lain, sekalipun Gunawan et al. (2018) menyebutkan kemitraan antara Balai Konservasi Penyu Pangumbahan dan sektor swasta, fokus penelitian mereka adalah perlindungan penyu hijau melalui pengelolaan pesisir terpadu. Oleh karena itu, dalam tulisan tersebut, program konservasi penyu belum ditinjau secara spesifik dari campur tangan pihak swasta. Selain itu, seperti kebanyakan kajian, mereka mengatakan bahwa perusahaan telah mendukung proyek ini dengan melakukan program pemberdayaan, peningkatan sarana dan prasarana, pengelolaan penyu melalui program adopsi penyu, dan sebagainya.

Harus diakui, serangkaian kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik mengangkat tema konservasi penyu laut dan CSR di Indonesia. Celah itulah yang coba untuk diisi oleh tulisan ini.

Dengan begitu, tema kajian akademik yang berkaitan dengan CSR secara khusus dan relasi bisnis dengan masyarakat secara umum menjadi lebih kaya dan beragam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif dengan data kualitatif. Di sini, kami mengumpulkan dokumen internal kami, dan mewawancarai anggota konservasi penyu, lurah Tobololo dan beberapa masyarakat setempat. Secara khusus, wawancara terstruktur dilakukan dengan responden tersebut. Setelah mewawancarai mereka, kami membandingkan atau memverifikasi data satu sama lain untuk mendapatkan hasil yang objektif, dan kemudian menyajikannya dalam artikel ini

Kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah Konservasi Penyu Ori Ma Fala (OMF). Konservasi yang terletak di Pantai Tobololo tersebut merupakan proyek konservasi penyu pertama di Ternate dan Maluku Utara. Itulah sebabnya, konservasi penyu itu menjadi kasus yang menarik untuk diketengahkan. Secara spesifik, penelitian ini menggambarkan bagaimana PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate telah melakukan proyek konservasi dan pengelolaan penyu sebagai mitra OMF dan pemangku kepentingan lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konservasi dan CSR

Keanekaragaman hayati, seperti spesies, ekosistem dan keragaman genetik, memainkan peran penting dalam keberlanjutan planet dan masyarakat. Sayangnya, karena pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, hilangnya keanekaragaman hayati sudah menjadi masalah global, dan mempengaruhi ekonomi dan kesejahteraan manusia. Itulah sebabnya, mempromosikan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sangat relevan, dan telah menarik minat banyak pemangku kepentingan. Institusi pemerintah di seluruh dunia dan badan

internasional seperti *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) telah mengadopsi berbagai kebijakan dan rencana pengarusutamaan keanekaragaman hayati dan memastikan mata pencaharian yang berkelanjutan. Namun, mengintegrasikan keanekaragaman hayati dalam kegiatan bisnis perusahaan tidaklah mudah. Pasalnya, hal tersebut menuntut perubahan yang tidak sedikit dari fungsi perusahaan (Martin et al., 2016; Polasky et al., 2019). Memang benar bahwa beberapa perusahaan, terutama perusahaan multinasional, telah menerapkan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati atas nama CSR, standar keberlanjutan perusahaan dan pelaporan keberlanjutan. Menjadi catatan, sebagian besar perusahaan cenderung menjalankan inisiatif keanekaragaman hayati dan sosial-ekonomi hanya untuk memenuhi laporan bisnis dan keberlanjutan, dan mereka tidak memiliki pernyataan visi dan misi perusahaan (Sharma et al., 2020:4).

Tentu saja, kemunculan isu keanekaragaman hayati dan ekosistem dalam kegiatan bisnis tidak terjadi dalam ruang hampa. Jika ditinjau secara lebih luas, ada perdebatan tentang peran bisnis dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Bagi ekonomi Milton Friedman (2007), satu-satunya tanggung jawab sosial atau tugas moral organisasi bisnis adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham mereka. Namun, pandangan tersebut mendapat respon dari sejumlah sarjana. Dukungan masyarakat terhadap perusahaan yang berkomitmen terhadap masalah sosial dan lingkungan tidak masuk ke dalam perhitungan Friedman (Feldman, 2007). Juga, tujuan perusahaan hanya mengejar profit tidaklah tepat, sebab tujuan perusahaan ialah penyediaan barang dan jasa demi memuaskan pelanggan, sedangkan profit adalah motif perusahaan (Furst, 2017).

Yang tidak kalah penting, pemegang saham hanyalah salah satu dari berbagai

pemangku kepentingan dalam sebuah perusahaan. Secara umum, bisnis memiliki banyak pemangku kepentingan, dan mereka termasuk pemegang saham, lembaga pemerintah, karyawan, pemasok, pelanggan, serikat pekerja, komunitas lokal, dan sebagainya. Itulah sebabnya, sebagaimana disebutkan Freeman et al. (2010:24), eksekutif perlu mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan tersebut sehingga setiap pemangku kepentingan dapat memperoleh nilai yang sebesar-besarnya. Bahkan, berangkat dari gagasan filantropi strategis, Porter dan Kramer (2002, 2006, 2011) memunculkan pandangan baru dalam melihat relasi bisnis dan masyarakat, yakni menciptakan nilai bersama (*creating shared value* (CSV)). Mereka berpendapat bahwa perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dengan memecahkan masalah sosial dan lingkungan dalam masyarakat.

Dalam konteks keanekaragaman hayati, Macellari et al. (2018) berpendapat bahwa bisnis merumuskan dan melaksanakan praktik keanekaragaman hayati tidak lepas dari tekanan pemangku kepentingan eksternal, terutama perusahaan ekstraktif, dan peluang bisnis. Di samping itu, cukup aman untuk mengatakan bahwa tren peningkatan bisnis yang bergerak di bidang konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati berkaitan dengan motif normatif. Pada titik ini, merangkul dan melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati dan konservasi merupakan sesuatu hal yang baik untuk dilakukan (*a right thing to do*). Itulah kemudian yang disebut dengan kewajiban moral perusahaan.

Seperti dikatakan sebelumnya, bisnis terdiri dari banyak pemangku kepentingan, dan siapa saja yang terlibat atau terpengaruh oleh perusahaan dapat dikategorikan sebagai bagian dari pemangku kepentingan. Itulah sebabnya kesuksesan sebuah perusahaan adalah untuk memuaskan semua pemangku kepentingannya,

tidak hanya pemegang saham seperti yang dikatakan Milton Friedman. Dalam kasus keanekaragaman hayati, partisipasi kelompok kepentingan tidaklah bisa dianggap sebelah mata (Jones-Walters dan Cil, 2011), dan beberapa sarjana telah menunjukkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam keanekaragaman hayati dan inisiatif konservasi. Menurut Boiral dan Heras-Saizarbitoria (2015), untuk sektor pertambangan dan kehutanan, perusahaan menjalin dan menjalankan kemitraan dan kolaborasi dengan empat jenis pemangku kepentingan utama dalam konservasi keanekaragaman hayati: 1) LSM dan masyarakat lokal; 2) para ahli dan ilmuwan; 3) otoritas publik; dan 4) koalisi dan asosiasi industri. Memang, pemangku kepentingan lain seperti pemasok dan karyawan terkadang disebutkan di sektor pertambangan dan kehutanan, tetapi peran mereka terasa kurang penting dibandingkan dengan pemangku kepentingan sebelumnya.

Keterlibatan LSM dan masyarakat lokal dalam konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati dapat memberikan beberapa manfaat bagi badan usaha seperti meningkatkan legitimasi perusahaan dan daya tanggap sosial melalui kemitraan dengan perwakilan dari masyarakat sipil, memperoleh keahlian khusus atau pengetahuan lokal melalui spesialis dari LSM, mengelola tekanan dari pemangku kepentingan, dan menerapkan sistem manajemen (Boiral dan Heras-Saizarbitoria, 2017). Dalam hal ahli dan ilmuwan, perusahaan menjalin kemitraan dengan ahli dan ilmuwan dari berbagai organisasi dalam bentuk proyek penelitian karena akan terlalu mahal jika perusahaan mengembangkannya secara internal. Otoritas publik sering terlibat dalam inisiatif keanekaragaman hayati sebagai regulator. Terakhir, keterlibatan koalisi dan asosiasi industri, seperti *International Council on Mining and Metals* (ICMM), adalah untuk membantu perusahaan saat bernegosiasi dengan pemangku kepentingan lainnya (Boiral dan Heras-Saizarbitoria, 2017).

Meskipun pemangku kepentingan sektor swasta beragam dalam konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati, Sharma et al. (2020:9-10) menjelaskan bahwa masyarakat lokal adalah yang terpenting, dan lembaga pemerintah berperan sebagai fasilitator atau regulator. Wajar, karena masyarakat setempat sering terkena dampak operasional bisnis dan penerima manfaat program CSR. Memang, di lokasi *in situ*, perusahaan kadang-kadang berinteraksi dengan masyarakat lokal, karena *in-situ* berarti proyek konservasi diadakan di dalam wilayah operasi bisnis. Namun, untuk lokasi *ex-situ*, masyarakat lokal memainkan peran besar, karena lokasi inisiatif konservasi berada di luar kendali perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan membantu masyarakat lokal dengan menyediakan sumber daya keuangan dan teknis.

Lebih lanjut, Boiral dan Heras-Saizarbitoria (2017) menjelaskan berbagai jenis inisiatif yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Pertama, pemangku kepentingan utama, terutama LSM dan koalisi serta asosiasi industri, terlibat dalam praktik pengelolaan keanekaragaman hayati. Secara khusus, mereka memainkan peran aktif untuk meningkatkan legitimasi perusahaan, dan mengembangkan serta menerapkan standar dan pedoman keanekaragaman hayati. Kedua, berbagai pemangku kepentingan eksternal seperti asosiasi industri, otoritas publik, LSM dan warga lokal dapat terlibat dalam aksi sosial-politik, untuk memperkuat citra perusahaan dan legitimasi sosial, seperti mendidik masyarakat lokal untuk menyadari pentingnya konservasi. Ketiga, otoritas publik, LSM, pakar atau ilmuwan terlibat untuk melakukan penelitian, mengembangkan inovasi, dan melindungi keanekaragaman hayati.

Di beberapa negara seperti India, sektor swasta diberi mandat untuk melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati dan konservasi. Nulkar dan Bedarkar (2020:59) berpendapat bahwa CSR di negara tersebut

penting untuk mengisi kesenjangan di beberapa bidang yang tidak tercakup oleh kebijakan nasional. Selain itu, India adalah negara besar dengan tantangan geografis, budaya, dan iklim, dan intervensi perusahaan dalam masalah sosial dan lingkungan terasa sangat relevan untuk India. Di negara tersebut, tidak jarang perusahaan tambang berkolaborasi dengan masyarakat lokal dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Di satu sisi, persyaratan kepatuhan ini memungkinkan perusahaan untuk mengarusutamakan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Di sisi lain, mereka terlibat dalam konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati hanya untuk memenuhi persyaratan, dan modal sosial antara sektor swasta dan masyarakat lokal tidak kuat karena kurangnya koordinasi dan keterampilan kolektif (Sharma et al., 2020:9). Akibatnya, aksi sosial untuk melestarikan keanekaragaman hayati terkadang tidak dapat ditransformasikan dari modal sosial sebagai sumber daya. Lebih buruk lagi, perusahaan yang merusak keanekaragaman hayati karena operasi bisnis mereka, berakhir dengan konflik dengan masyarakat lokal.

Tobololo sebagai Situs Konservasi Penyu

Ternate terkenal memiliki berbagai flora dan fauna endemik. Di pulau kecil ini, misalnya, berbagai jenis penyu sudah hidup sejak lama, dan Tobololo, salah satu kelurahan di Ternate, merupakan salah satu tempat bertelur penyu terpenting di kota ini. Meski sebagian besar penduduk di Tobololo bergantung pada komoditas pertanian seperti pala dan lada, sebagian penduduk setempat memanfaatkan Pantai Tobololo yang berjarak kurang lebih 1.500 meter itu untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Untungnya, mereka tidak menggunakan jaring pukat dan kapal penangkap ikan yang dikomersialkan sehingga keanekaragaman hayati laut Pantai Tobololo relatif terlindungi dari aktivitas penangkapan ikan.

Selain sektor perikanan, sebagian masyarakat mengoptimalkan sektor pariwisata untuk mencari nafkah. Dalam artian, mereka menjual makanan dan minuman untuk wisatawan lokal. Memang, sektor pariwisata di Tobololo masih belum berkembang. Namun, masyarakat yang tinggal di Ternate sering mengunjungi Pantai Tobololo, terutama pada akhir pekan. Kenyataan ini tidaklah mengejutkan sebab aksesnya relatif mudah—berjarak sekitar 10 km dari pusat kota dan 6 km dari Bandara Sultan Babullah. Selain itu, Pantai Tobololo menawarkan pantai yang tenang dengan pasir putih dan hitam serta enam sumber air panas. Apalagi di Pantai Tobololo, orang bisa menikmati keindahan eksotisme pulau Halmahera dan Hiri dari kejauhan.

Sekalipun penyu laut dilindungi di negeri ini, penyu laut seperti penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) di Ternate telah terancam punah karena faktor alam dan buatan manusia. Hewan predator seperti biawak, kepiting dan burung sering menyerang dan memakan telur dan tukik penyu. Namun, ancaman utama bagi kelangsungan hidup mereka adalah manusia. Pada titik ini, telur penyu dipercaya dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit sistem saraf dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Tidaklah mengejutkan jika telur penyu kemudian diburu, diperjualbelikan, dan dikonsumsi.

Sebelum OMF didirikan, masyarakat Tobololo juga mempercayai hal-hal seperti itu. Namun, keyakinan buruk tersebut tidaklah faktor tunggal dalam menjelaskan perburuan telur penyu di sana. Kurangnya pengetahuan di tengah masyarakat terkait arti penting konservasi penyu juga merupakan satu variabel yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi, sebagian besar masyarakat di daerah tersebut memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Penjelasan lain adalah ketiadaan upaya serius dari berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, NGO, sektor swasta, dan masyarakat lokal untuk menghentikan eksploitasi komersial telur penyu

laut. Promosi pengetahuan perihal konservasi penyu pun nihil. Akibatnya, eksploitasi komersial penyu laut merajalela di Tobololo.

Ori Ma Fala: Rumah Penyu

Untuk melindungi populasi penyu di Ternate, bersama Dinas Perikanan Kelautan Pemrov Maluku Utara, dua dosen Universitas Khairun menginisiasi program konservasi penyu berbasis masyarakat di Tobololo pada 2015, yang pada pembentukannya ternyata merupakan konservasi penyu pertama di Ternate dan Maluku Utara. Pasalnya, kedua dosen tersebut, salah satunya warga Tobololo, khawatir penyu bisa hilang sama sekali dari Pantai Tobololo jika masyarakat setempat tidak mengambil tindakan serius untuk melindunginya. Mereka berpendapat bahwa masyarakat setempat tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup tentang perlindungan satwa langka, dan harus berpartisipasi dalam konservasi penyu.

Kenyataan itulah yang menjadi dasar pembentukan OMF. Nama OMF sendiri berasal dari kata Ternate Ori yang berarti "penyu", dan Fala yang berarti "rumah". Dengan nama itu, seluruh anggota komunitas konservasi tersebut berharap OMF bisa seperti rumah bagi penyu laut. Menariknya, guna meningkatkan kesadaran masyarakat setempat, seorang mantan pemburu telur penyu dipilih sebagai pemimpin konservasi berbasis masyarakat tersebut.

Inisiatif ini sejalan dengan *Convention on International Trade in Endangered Species*. Di dalamnya disebutkan bahwa penyu telah terancam punah akibat aktivitas manusia, dan diklasifikasikan sebagai hewan yang dilindungi. Oleh karena itu, tindakan positif manusia diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup sebagian besar spesies penyu (Rupilu et al., 2019:1-2). Di tingkat nasional, inisiatif ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dalam peraturan ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan semua

jenis penyu sebagai hewan yang dilindungi. Apalagi menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pelaku (pedagang dan pembeli) perdagangan penyu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan paling banyak Rp. 100 juta. Pemanfaatan satwa dilindungi hanya diperbolehkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, dan penyelamatan satwa itu sendiri.

Di tingkat lapangan, OMF sering menyisir pantai untuk mencari telur penyu, mengumpulkan, menetas telur dan melepaskan tukik ke habitat aslinya. Pemimpin konservasi berbasis masyarakat itu, seorang mantan pemburu penyu, selalu memimpin tim untuk melakukan semua kegiatan tersebut. Pada awalnya, konservasi berbasis masyarakat itu kekurangan sumber daya dan fasilitas untuk melindungi penyu dan membangun kembali populasinya ke tingkat yang sehat. Sebagai contoh, mereka memindahkan telur penyu dari pantai dan memasukkannya ke dalam bak dengan pasir di pekarangan mereka.

Beberapa tahun setelah peluncuran proyek konservasi berbasis masyarakat, anggota OMF semakin menyadari pentingnya kemitraan dengan organisasi lain seperti badan usaha dan lembaga non-pemerintah untuk meningkatkan proyek konservasi. Ini menunjukkan bahwa inisiatif akar rumput penting untuk melindungi populasi dan habitat penyu. Namun, itu tidak cukup untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk proyek konservasi. Situasi ini kemudian membuka jalan untuk kemitraan dengan PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate.

Menghubungkan CSR dengan Konservasi Berbasis Masyarakat

Pada tahun 2021, konservasi berbasis masyarakat dikaitkan dengan CSR. Sebagai entitas bisnis, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate percaya bahwa keanekaragaman hayati harus dilestarikan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan

kesejahteraan manusia. Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate melihat OMF kekurangan sumber daya dan fasilitas untuk melindungi penyu laut. PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate kemudian bekerja sama dengan OMF untuk meningkatkan konservasi penyu dan mempromosikan pengetahuan konservasi

Di tahun yang sama, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate dan OMF mengadakan pelatihan kerajinan kerang bagi masyarakat sekitar. Sebab, masyarakat setempat menganggap kerang sebagai sampah. Padahal, kerang tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan yang bernilai ekonomis, seperti karangan bunga kerang dan hiasan kerang lainnya. Sejauh ini, masyarakat setempat sudah bisa membuat berbagai jenis kerajinan kerang. Ke depan, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate akan memberikan beberapa pelatihan lanjutan agar masyarakat setempat pada umumnya dan anggota OMF pada khususnya dapat menjual kerajinan kerang ke pasar, dan mencari nafkah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka

Tentu saja, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate melaksanakan kegiatan tersebut bukan tanpa pertimbangan. Sebagian besar anggota OMF adalah relawan. Pada titik ini, mereka tidak mendapatkan imbalan uang untuk berpartisipasi dalam proyek konservasi. Bagaimanapun, sulit untuk mengharapkan proyek itu berkelanjutan jika para anggota tidak melihat manfaat keuangan bagi mereka (Harahap et al., 2015:43-44). Hal itulah yang melatarbelakangi diadakannya pelatihan kerajinan kulit kerang bagi anggota OMF dan masyarakat sekitar di Tobololo. Dalam jangka panjang, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate memiliki rencana untuk mengintegrasikan proyek tersebut dengan konsep ekowisata sehingga PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar pada umumnya dan anggota OMF pada khususnya.

Terlebih, Pantai Tobololo merupakan salah satu tujuan wisata favorit di Ternate.

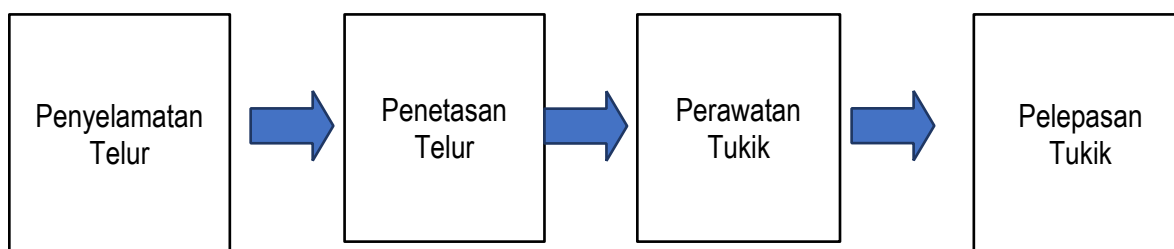
Saat PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate siap mengembangkan proyek ini, penangkaran penyu milik OMF rusak akibat gelombang pasang yang tinggi pada akhir tahun 2021. Akibatnya, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate harus membatalkan agenda pengembangan pariwisata berbasis konsep ekowisata di Pantai Tobololo. Tahun ini, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate fokus membangun penangkaran baru tukik dan penyu yang dikelola OMF. Hal itu dilakukan DPPU PT Pertamina Patra Niaga Babullah Ternate karena untuk mencapai tingkat penetasan yang tinggi membutuhkan tempat perlindungan yang memadai. Oleh sebab itu, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate mengalokasikan sejumlah dana untuk membangunnya, dan OMF yang didukung oleh pemerintah kelurahan Tobololo berkontribusi dengan menyediakan lahan, yang benar-benar berbeda dari tempat penangkaran yang lama dan lebih aman dari gelombang pasang yang tinggi, untuk penangkaran yang baru.

Di penangkaran ini, OMF akan melestarikan telur dan tukik penyu. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup mereka ketika penyu dilepaskan ke habitat aslinya. Selain itu, pembangunan penangkaran sangat penting untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mengenal dan belajar tentang penyu. Orang-orang ini seperti peneliti dan mahasiswa dapat melakukan penelitian di penangkaran, dan kemudian memberikan rekomendasi berharga dari penelitian mereka untuk meningkatkan populasi dan habitat penyu, dan mempromosikan pengetahuan konservasi. Hal ini juga memungkinkan berbagai lembaga seperti organisasi pemerintah dan non-pemerintah untuk memahami pentingnya melindungi penyu sebagai salah satu hewan yang terancam punah di dunia. Semoga bisa menginspirasi mereka untuk

mengerjakan proyek yang sama di tempat yang berbeda.

Selain pembangunan tempat perlindungan baru, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate juga menyediakan panel surya dengan mesin pembuat pelet. PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate menyadari bahwa OMF sering melepaskan bayi penyu empat hari setelah mereka menetas, karena OMF tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membesarkan anak penyu tersebut selama lebih dari empat hari. Sebagai gambaran, OMF

membutuhkan dana sekitar Rp. 500.000 setiap hari untuk memberi mereka makan. Alasan lainnya adalah tukik-tukik tersebut akan saling memangsa jika tidak dilepaskan lebih dari empat hari, sebab mereka bisa makan biasanya di hari keempat pasca menetas. Dengan menyediakan panel surya dengan mesin pelet pakan, OMF akan dapat membesarkan bayi penyu di penangkaran baru sebelum melepaskannya ke habitat aslinya. Gambar berikut menyajikan proses konservasi selanjutnya.



Gambar 1. Proses Konservasi Penyu

Mekanisme itu juga akan menarik lebih banyak pengunjung untuk datang ke lokasi konservasi baru untuk melihat penyu. Selain itu, seperti dikatakan sebelumnya, akan memungkinkan OMF untuk mengembangkan ekowisata dengan merilis kalender penyu dalam satu tahun. Dalam konteks ini, OMF akan mampu mengajak siswa SD atau SMA di Ternate untuk menikmati ekowisata serta memberikan tarif kepada mereka dari kegiatan itu, dan mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut. Terakhir, memasang panel surya sebagai sumber listrik untuk proyek ini jauh lebih ramah lingkungan dan jauh lebih murah.

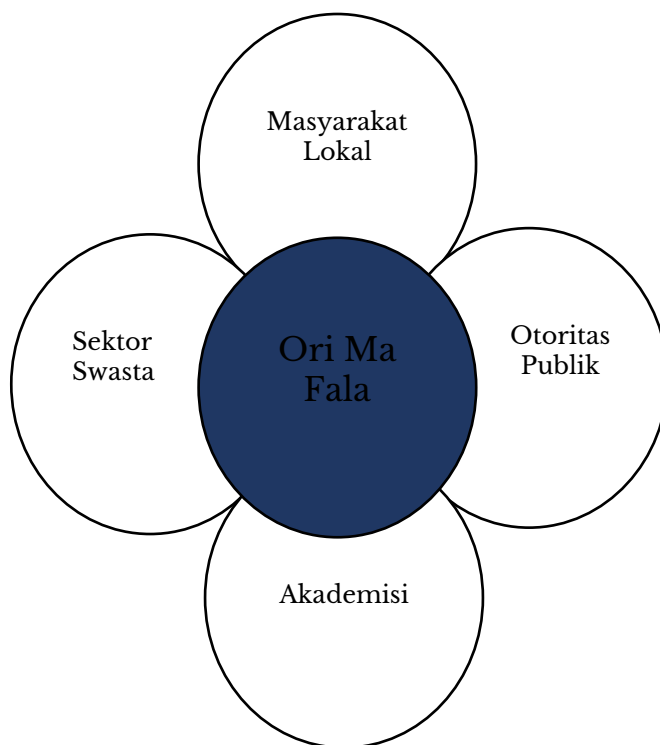
Secara umum, keterlibatan PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate dalam konservasi tersebut telah menciptakan kemitraan multi-stakeholder antara OMF, masyarakat setempat, otoritas publik, sektor swasta dan akademisi. Fenomena itu sesuai dengan tren CSR

belakangan ini di level global (Yakovleva dan Alabaster, 2004). Sebagaimana dijelaskan Warner (2003), kompleksitas masalah sosial dan lingkungan membutuhkan kemitraan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat sipil. Tanpa itu, tidak ada satu aktor pun yang mampu mencapai pembangunan berkelanjutan. Terlebih, kemitraan antara berbagai aktor semakin menemukan momentumnya akibat kegagalan

pemerintah, pasar dan masyarakat sipil (van Tulder dan van der Zwart, 2006:31).

Meskipun tidak ada definisi tunggal dari kemitraan multi-stakeholder, masing-masing aktor bekerja menuju tujuan bersama dengan berbagi risiko, sumber daya, dan kompetensi. Dalam proyek konservasi penyu di Tobololo, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate berkontribusi melindungi penyu sebagai salah satu hewan yang terancam punah dan mempromosikan pengetahuan konservasi kepada publik dengan menyuntikkan sumber daya yang cukup besar ke OMF, dan meningkatkan

legitimasi perusahaan kepada pemangku kepentingan lainnya. Masyarakat setempat memberi tahu OMF dan otoritas publik ketika mereka menemukan telur penyu dan penjualan telur penyu ke pasar. Akademisi, yang merupakan dua dosen di Universitas Khairun, membimbing OMF untuk mengembangkan inovasi dan melindungi keanekaragaman hayati. Dengan bersinergi, seluruh pemangku kepentingan memastikan penyu tetap hidup di Maluku Utara pada umumnya dan Ternate pada khususnya. Gambar 2 menunjukkan kemitraan multi-stakeholder dalam proyek ini.



Gambar 2. Kemitraan Multi Stakeholders

Meningkatkan Kesadaran Lokal dan Patroli Penyu

Seperti disebutkan sebelumnya, keterlibatan PT Pertamina Patra Niaga DPPU

Babullah Ternate dalam konservasi ini telah menjalin kemitraan multi-stakeholder antara OMF dan pemangku kepentingan lainnya. Memang, pemberdayaan OMF sangat penting dalam konservasi tersebut, tetapi meningkatkan

kesadaran masyarakat tidak dapat diabaikan untuk mengoptimalkan hasil proyek itu. Dalam hal sosialisasi, OMF sering menghadiri beberapa kesempatan seperti pertemuan kelurahan dan

kota untuk mengedukasi masyarakat untuk memahami pentingnya melestarikan penyu. Harus diakui, ikhtiar tersebut telah meningkatkan kesadaran warga. Sebagai ilustrasi, OMF selalu melibatkan anak-anak muda di Tobololo untuk melepaskan tukik ke laut. Dengan melakukan kegiatan tersebut, generasi muda diharapkan dapat membangun fondasi yang kuat untuk menjalankan konservasi secara berkelanjutan.

Seperti disampaikan sebelumnya, contoh lain OMF menghimbau kepada masyarakat di Tobololo untuk melaporkan semua penyu yang bertelur, sarang, dan tukiknya saat musim penyu bertelur (Agustus-April). Jika terlihat penyu bertelur, penduduk setempat menghubungi OMF, dan mereka harus tetap berada di lokasi sampai salah satu anggota OMF tiba. Tidak diragukan lagi, potret tersebut adalah perubahan nyata dalam masyarakat lokal dan perilaku masyarakat tentang perlindungan penyu di Tobololo. Lebih spesifik, mereka telah menerima spesies ini sebagai salah satu hewan yang dilindungi, dan memiliki tanggung jawab juga untuk melestarikannya.

Dalam hal patroli, OMF dibantu oleh Babinsa-TNI, dan ia juga merupakan anggota OMF. Dalam hal ini, peran Babinsa-TNI adalah memantau individu atau kelompok yang mengumpulkan dan menjual telur penyu ke pasar. Masyarakat setempat juga menghubungi Babinsa-TNI ketika mengetahui individu atau kelompok mengambil keuntungan ekonomi dari penyu seperti penjualan daging dan telur penyu ke pasar, kemudian Babinsa-TNI datang ke lokasi yang dibagikan oleh masyarakat setempat dan mengambil daging dan telur penyu dari individu atau kelompok tersebut. Pada musim penyu bertelur (Agustus-April), anggota OMF juga

berpatroli di Pantai Tobololo dengan melakukan sisir pantai pada malam hari.

Seperti di kawasan konservasi lainnya, penegakan hukum dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Babinsa-TNI, Polres Ternate, dan sebagainya. Mereka semua membentuk satgas bersama, dan melakukan razia telur penyu dan penyu paling sedikit dua kali setahun. Peran gugus tugas bersama ini sangat penting untuk mencegah eksploitasi komersial penyu laut. Menariknya, pelepasan bayi penyu terkadang dilakukan bersamaan dengan acara-acara khusus, seperti acara kunjungan politisi, mahasiswa, dan sebagainya. Namun, tidak ada acara atau agenda rutin untuk kegiatan ini sepanjang tahun. Karena itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, DPPU PT Pertamina Patra Niaga Babullah Ternate mendorong OMF untuk mengembangkan ekowisata dengan merilis kalender penyu dalam satu tahun kalender.

KESIMPULAN

Sampai di sini, tulisan ini telah menggambarkan bagaimana proyek konservasi penyu diimplementasikan oleh sektor swasta di Indonesia melalui studi kasus OMF di Pantai Tobololo, Ternate, Maluku Utara. OMF diprakarsai oleh dua dosen Universitas Khairun dan Dinas Perikanan Kelautan Pemprov Maluku Utara untuk melindungi populasi penyu di Ternate, dan seorang mantan pemburu di Tobololo terpilih sebagai pemimpin konservasi berbasis masyarakat ini. Karena kurangnya sumber daya keuangan dan teknis, konservasi berbasis masyarakat dikaitkan dengan CSR PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate pada tahun 2021.

Keterlibatan PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate dalam konservasi ini telah menciptakan kemitraan multi-stakeholder antara OMF, masyarakat setempat, otoritas publik, sektor swasta dan akademisi. Secara khusus, PT Pertamina Patra Niaga DPPU

Babullah Ternate berkontribusi untuk melindungi penyu sebagai salah satu hewan yang terancam punah dan mempromosikan pengetahuan konservasi kepada publik dengan menyuntikkan sumber daya yang substansial ke OMF, dan meningkatkan legitimasi perusahaan kepada pemangku kepentingan lainnya.

Yang tidak kalah penting, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate dan OMF melakukan pelatihan kerajinan kerang bagi masyarakat sekitar. Namun, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate tidak hanya berhenti di situ. Pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dijelaskan Mwaseba et al. (2009), tidak cukup hanya dengan melakukan pelatihan. Itulah sebabnya, sekalipun rencana awal mengembangkan ekowisata harus tertunda akibat rusaknya penangkaran lama, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate tetap tidak mengabaikan arti penting penangkaran bagi konservasi penyu laut. Sebagai ilustrasi, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate tengah membangun penangkaran baru untuk tukik dan penyu laut. PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate juga menyediakan solar panel dengan mesin pembuat pelet. Dengan memberikan semua dukungan tersebut, para anggota OMF akan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari konservasi penyu tersebut, dan OMF akan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarsari, Novinda D. P. 2016. Evaluasi Kinerja Program Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Pertanian dalam Perspektif Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Banyuwangi. Jember: Universitas Jember.
- Boiral, Olivier and In aki Heras-Saizarbitoria. 2015. "Managing Biodiversity Through Stakeholder Involvement: Why, Who, and for What Initiatives?" *Journal of Business Ethics*. DOI 10.1007/s10551-015-2668-3.
- Baroth, Anju and V. B. Mathur. 2019. "Wildlife Conservation through Corporate Social Responsibility Initiatives in India." *Current Science*. 111(3), pp. 405-411.
- CSR Netherlands. 2016. *Country Scan CSR in Indonesia*. Netherlands.
- Feldman, G. 2007. Putting Uncle Milton to Bed Reexamining Milton Friedman's Essay on the Social Responsibility of Business. *Labour Studies Journal*. 32(2), pp. 125-141.
- Freeman, R. E. et al. 2010. *Stakeholder Theory: The State of the Art*. New York: Cambridge University Press.
- Friedman, Milton. 2007. The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits. In Zimmerli, W. C. et al. (Eds.), *Corporate Ethics and Corporate Governance*. Berlin: Springer.
- Furst, M. 2017. Just When You Thought it Couldn't Get Worse, You Hear: "The Business of Business is Business" - Some Reflections on a Self-Fulfilling Prophecy and Alternative Perspectives on the Purpose of Companies. In J. Wieland (Ed), *Creating Shared Value - Concepts, Experience, Critism*. Cham: Springer.
- Gunawan, Daden et al. 2018. "Protecting the Green Turtle through Integrated Coastal Management." *Local Contrib. to Glob. Sustain. Dev. agenda Case Stud. Integr. Coast. Manag. East Asian Seas Reg. Partnerships Environ. Manag. Seas East Asia Coast. Manag. Cent.*, pp. 269-282.
- Harahap et al. 2015. Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Penyu Pangumbahan Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. 20 (1), pp. 39-46.
- Hidayati, Ratih and Hendra Wijayanto. 2018. "Pengaruh Program CSR "Kuta Beach Sea Turtle Conservation" terhadap Brand Image Perusahaan." *Expose - Jurnal Ilmu Komunikasi*. 1(2), pp. 114-122.
- Jones-Walters, L. and A. Cil. 2011. Biodiversity and Stakeholder Participation. *Journal for*

- Nature Conservation. 19, pp. 327-329.
- Martin et al. 2016. The Need to Respect Nature and its Limit Challenges Society and Conservation Science. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 113(22), pp. 6105-6112.
- Macellari et al. 2018. Embedding Biodiversity and Ecosystem Services in Corporate Sustainability: A Strategy to Enable Sustainable Development Goals. Business Strategy & Development. 1(4), pp. 244–255.
- Mwaseba et al. 2009. Perceptions and Practises of Farmers Empowerment in Tanzania. Development in Practice. 19(3), pp. 403-413.
- Nulkar, Gurudas and Madhura Bedarkar. 2020. Does Nature Conservation Matter to Corporations? In Sharma, Ravi et al. (Eds.), Corporate Biodiversity Management for Sustainable Growth: Assessment of Policies and Action Plans. Cham: Springer.
- Persoon, Gerard A. and Merlijn van Weerd. 2006. Biodiversity and Natural Resource Management in Insular Southeast Asia. Island Studies Journal. 1(1), pp. 81-108.
- Polasky et al. 2019. Role of Economics in Analyzing the Environment and Sustainable Development. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 116(12), pp. 5233-5238.
- Porter, Michael and Mark Kramer. 2002. The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy. Harvard Business Review. 80(12), pp. 56–68.
-
2006. Strategy & Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review. 85(12), pp. 78–92.
-
2011. Creating Shared Value: How to Fix Capitalism and Unleash a New Wave of Growth. Harvard Business Review. 89(1), pp. 62–77.
- Reade, Carol et al. 2014. "CSR, Biodiversity and Japan's Stakeholder Approach to the Global Bumble Bee Trade." The Journal of Corporate Citizenship. 2014 (56), pp. 53-66.
- Rupilu et al. 2019. "Species Identification and Spawning of Sea Turtle at Meti Island North Halmahera Regency". IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 339 (2019) 012034. doi:10.1088/1755-1315/339/1/012034.
- Simatupang, Erwinton and Vandy Yoga Swara. 2018. "Creating Shared Value di Industri Migas: Pelajaran dari Balongan dalam Meminimalisir Pengangguran dan Menekan Potensi Kecelakaan Kerja." Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan. 2 (1), pp. 67-90.
-
2019. Membaca Arena Baru Sub Politik Anak Muda dalam Memaknai Risiko Industri Ekstraktif. Jurnal Studi Pemuda. 8(2), pp. 99-112.
- Sharma, Ravi et al. 2020. Corporate Biodiversity Management: Expanding the Horizons of Managing Biodiversity and Environmental Management. In Sharma, Ravi et al. (Eds.), Corporate Biodiversity Management for Sustainable Growth: Assessment of Policies and Action Plans. Cham: Springer.
- van Tulder, Rob and Alex van der Zwart. 2006. International Business -Society Management: Linking Corporate Social Responsibility and Globalization. London: Routledge.
- Warner, Michael. 2003. Partnership for Sustainable Development: Do We Need Partnership Brokers? London: Overseas Development Institute.
- Winn, Monica I and Stefano Pogutz. 2013. "Business, Ecosystems, and Biodiversity." Organization & Environment. 26(2), pp. 203–229.
- Yakovleva, Natalia and Tony Alabaster. 2004.

Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat
Jurnal Program Studi Pendidikan Masyarakat
Universitas Mulawarman
Vol. 3 No. 1, Juni 2022. Hal: 57 - 70

"Tri-sector Partnership for Community Development in Mining: A Case Study of the SAPI Foundation and Target Fund in the Republic of Sakha (Yakutia)." *Resources Policy*. 29(3-4), pp. 83-98.